

ABSTRAK

Masalah ketenagakerjaan selalu menjadi prioritas utama pemerintah. Berbagai kebijakan ketenagakerjaan difokuskan untuk mengurangi angka pengangguran. Salah satu cara mengurangi angka pengangguran adalah dengan melakukan kebijakan yang terintegrasi untuk pelayanan penempatan tenaga kerja melalui AK/I – AK/V. Sayangnya, kebijakan tersebut terbukti gagal mencapai tujuannya, khususnya di Kabupaten Jombang. Meskipun kebijakan tersebut telah dijalankan, namun Tingkat Partisipasi Angka Pengangguran (TPAK) di Kabupaten Jombang masih tinggi. Artinya, pencari kerja rata-rata adalah pencari kerja pasif yang tidak terlibat di pasar kerja. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa implementasi kebijakan AK/I – AK/V tidak berhasil mencapai tujuan utamanya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis data deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, dan penelusuran literatur. Wawancara dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan menggunakan model implementasi kebijakan Edwards III, dimana terdapat empat dimensi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu *Communications*, *Resources*, *Dispositions*, dan *Bureaucratic Structure*.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hambatan pada poin *Communications*, *Resources*, *Dispositions* dan *Bureaucratic Structure*. Hambatan-hambatan tersebut menggambarkan bahwa pelaksana kebijakan di tingkat daerah tidak memahami kebijakan substantif pelayanan AK/I – AK/V, sehingga kebijakan hanya dilaksanakan secara parsial dan prosedur utama dan yang penting justru dihilangkan. Selain itu, pejabat di tingkat daerah juga tidak konsisten dalam pelaksanaan kebijakan. Terkait dengan fasilitas, hambatan yang dihadapi adalah masih banyak kekurangan sarana dan prasarana pelayanan. SOP yang dibuat juga menghambat keberhasilan implementasi.

Kata Kunci : Pelayanan AK/I – AK/V, Model implementasi kebijakan Edwards III

ABSTRACT

Labor Issues are always in the top priority of the Government. Many policies are created for decrease unemployment. For decreasing unemployment, our government creates an integrated policy for employment services through the AK/I – AK/V services. Unfortunately, that policy failed to reach its purpose, especially in Jombang Regency. Although this policy has been implemented, *Tingkat Partisipasi Angka Pengangguran (TPAK)* in Jombang Regency always stays in high level. It means that jobseekers are passive, who did not involved in job market. So, the purpose of this research is to find out the reason of why the implementation of AK/I – AK/V policies failed to reach its purpose.

This research uses qualitative approach which takes description-qualitative technique as data analysis method. Data were collected through interview, direct observation, and literary study. Interview was conducted through purposive sampling and snowball sampling. To evaluate the success of policy implementation, this research uses the model of Edwards III, which divided into 4 dimensions, Communications, Resources, Dispositions, and Bureaucratic Structure.

The research result shows that there are many obstacles in Communications, Resources, Dispositions and Bureaucratic Structure. All of the obstacles show that local government did not understand the main idea of substantive policy of AK/I – AK/V. It causes this policy just implemented partially and then the main procedure was eliminated. Beside, local public administrators did not consistently implementing this policy. SOP also limiting the policies implementation.

Key Words: AK/I – AK/V Services, Policies Implementation Model by Edwards III